



VISUALISASI HASIL PEMBANGUNAN

**KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2014-2017**



**VISUALISASI HASIL PEMBANGUNAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2014-2017**

Cover

Daftar Isi	i
MISI 1: PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN YANG MURAH DAN BERKUALITAS SERTA PELESTARIAN/PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1
Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar	2
Pengoperasian Angkutan Sekolah Gratis	4
Pelestarian Seni Budaya Daerah	6
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Bantuan Guru Swasta	7
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis	8
Pengembangan Sekolah Ramah Anak	10
MISI 2: PENINGKATAN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN YANG MURAH DAN BERKUALITAS	11
Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan di Tingkat Dasar	12
Pemantapan Layanan Public Safety Center (PSC) Kabupaten Tulungagung	14
Pengembangan Puskesmas Peduli Jiwa	16
Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan Tingkat Rujukan	17
Pengembangan Klinik VCT (Voluntary Counselling and Testing)	18
Pengembangan Puskesmas Ramah Anak	19
Kampung KB	20
MISI 3: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BAIK, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN DEMOKRATIS	22
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	23
Fasilitasi P4GN (Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)	25
Peningkatan e-Government	26
MISI 4: PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERBASIS PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN SEKTOR-SEKTOR YANG LAIN	27
Jalan Hotmix	28
Pembangunan Ring Road Timur dan Pembangunan Jembatan Ngujangan II	30
Pembangunan Sektor Sanitasi dan Air Minum	32
Pembangunan Saluran Irigasi	33
Jembatan	34
Pembangunan Jalan Selingkar Wilis	35
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	37
Pembangunan Rusunawa	39
Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Kecamatan dan Kantor Desa	40
MISI 5: PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS UKM, PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN PARIWISATA SERTA PERKEBUNAN MELALUI KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN	42
Ketahanan Pangan	43
Kerjasama Pengembangan Wisata	46
Revitalisasi Pasar Rakyat	48
Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	51
Agropolitan	53
Minapolitan	55
MISI 6: PENGENTASAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN POLA TERPADU	57
Pemantapan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (PSAI)	58
Rehab Rumah Tidak Layak Huni	60
Pembangunan/Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK)	62
Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA)	63
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	64
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	65

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, dimana dari tahun ke tahun terus ditingkatkan, baik dari sisi sasaran maupun pola pembiayaan.

Pada tahun 2012 pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat mencakup sasaran sebanyak 233.649 jiwa, tahun 2013 dan 2014 meningkat menjadi 305.269 jiwa, tahun 2015 sebanyak 310.242 jiwa, tahun 2016 sebanyak 309.900 jiwa dan tahun 2017 sebanyak 312.871 jiwa.

Dari sisi pola pembiayaan, mulai tahun 2015 pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui APBD dilaksanakan melalui kerjasama dengan BPJS.

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin direalisasikan pula melalui Program pelayanan operasi katarak, ambulance jemput dan pelayanan kegawatdaruratan pre hospital peserta PBI, bayi baru lahir anak peserta PBI, gelandangan, anak terlantar, penghuni panti-panti sosial, penghuni Lapas, peserta keluarga harapan, masyarakat kena musibah Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana alam, maskin yang tidak memiliki penjamin (non kartu), kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), balita Kekurangan Energi Kalori dan Protein (gizi buruk) serta kasus Kejadian Ikutan paska Imunisasi (KIPI). Pelayanan yang disediakan meliputi rawat darurat, rawat jalan, rawat inap dan persalinan dengan hak kelas III, pelayanan alat medis habis pakai, pelayanan obat, pelayanan darah, ambulan rujuk dan ambulan jenazah serta pemulasaraan jenazah.

Dan dalam rangka perencanaan program penanggulangan kemiskinan khususnya terkait ketepatan sasaran program, dilaksanakan verifikasi dan validasi data penduduk miskin baik penduduk miskin PBI (Penerima Bantuan Iuran) maupun non PBI di Kabupaten Tulungagung.



Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

SLRT adalah sistem layanan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam data terpadu dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan dibentuknya SLRT adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan dengan cara meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap multi program, integrasi berbagai layanan sosial di daerah dan meningkatkan kapasitas pemerintah di semua tingkatan.

Secara kelembagaan di Kabupaten Tulungagung telah di bentuk perangkat organisasi SLRT dengan komposisi seorang manajer, supervisor 4 orang, fasilitator 50 orang yang tersebar di seluruh wilayah Kab. Tulungagung dan 5 orang di front office. Sedangkan pada tingkat desa telah dibentuk 2 Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) pilot project di Desa Tugu Kec. Sendang dan desa Wates Kec. Sumbergempol. Sebagai tahap awal SLRT telah melakukan verifikasi data kemiskinan dan PMKS di Kabupaten Tulungagung. Hasil dari proses verifikasi ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program dan penganggarannya. Dengan demikian pelaksanaan program penangan kemiskinan benar benar terukur dan akuntable.

MISI 1

**PENINGKATAN PELAYANAN
PENDIDIKAN
YANG MURAH DAN BERKUALITAS
SERTA
PELESTARIAN/PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN**

Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar

Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas, keberadaan sarana prasarana pendidikan yang memadai merupakan prasarat pokok. Untuk itu secara rutin setiap tahunnya telah dilaksanakan program peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar antara lain rehabilitasi ruang kelas tingkat SD/SMP, Ruang Kelas Baru SD/SMP, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan MCK baik yang didanai dari APBD Kabupaten maupun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Di tahun 2015, untuk sekolah dasar antara lain rehabilitasi ruang kelas tingkat SD dengan sasaran 94 lembaga, Ruang Kelas Baru SD sebanyak 7 lembaga, Pembangunan Perpustakaan sebanyak 8 lembaga, Pembangunan MCK SD sebanyak 13 lembaga. Rehabilitasi ruang kelas tingkat SMP dengan sasaran 33 lembaga, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP pada 2 lembaga pembangunan MCK SMP sebanyak 3 lembaga, Perpustakaan dan Laboratorium pada 2 lembaga serta peningkatan mutu (bantuan peralatan).

Sedangkan untuk sekolah menengah, melalui kegiatan rehabilitasi ruang belajar dengan sasaran 16 lembaga, pembangunan Ruang Kelas Baru sebanyak 13 lembaga, pembangunan Ruang Praktek Siswa sebanyak 5 lembaga, pembangunan jamban pada 10 lembaga, pembangunan ruang kantor/guru pada 1 lembaga dan laboratorium pada 2 lembaga beserta peralatannya.

Di tahun 2016, antara lain rehabilitasi ruang kelas tingkat SD dengan sasaran 69 lembaga, Ruang Kelas Baru SD sebanyak 4 lembaga, Pembangunan Perpustakaan sebanyak 1 lembaga, Pembangunan MCK SD sebanyak 31 lembaga, rehabilitasi Ruang Kantor/Guru sebanyak 9 lembaga. Adapun Rehabilitasi ruang kelas tingkat SMP dengan sasaran 9 lembaga, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP pada 2 lembaga pembangunan MCK SMP sebanyak 16 lembaga

Pada tahun 2017 direalisasikan dengan rehabilitasi ruang kelas tingkat SD dengan sasaran 16 lembaga, Pembangunan Ruang Kelas Baru SD sebanyak 1 lembaga dan penambahan koleksi perpustakaan 120 lembaga Sedangkan Rehabilitasi ruang kelas tingkat SMP dengan sasaran 6 lembaga, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP pada 1 lembaga dan Pembangunan ruang laboratorium IPA 1 lembaga.

Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA)

Guna penurunan angka kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, mulai tahun 2014 dilaksanakan Program Jalin Matra di Kabupaten Tulungagung dengan 2 (dua) sasaran program yakni BRTSM (bantuan rumah tangga sangat miskin) dan PFK (penanggulangan feminisasi kemiskinan) dan tahun 2015, sasaran Rumah Tangga dengan status kesejahteraan 10% terendah (Desil 1) berdasarkan PLS 2011 sebanyak 129 RTSM di 5 desa pada 4 kecamatan yaitu Desa Bulus, Bantengan Kecamatan Bandung, Desa Ngrance Kecamatan Pakel, Desa Sukorejo Kecamatan Karangrejo dan Desa/Kecamatan Besuki.

Disamping itu dalam rangka penguatan ekonomi pada RTSM khususnya dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan, maka dilaksanakan Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, sasaran sebanyak 168 Kepala Rumah Tangga Perempuan di 7 Desa pada 6 Kecamatan yaitu Desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu, Desa Pojok Kecamatan Campurdarat, Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir, Desa Gesikan Kecamatan Pakel, Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan, Desa Tawangsari dan Mangunsari Kecamatan Kedungwaru. Selanjutnya Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) dilaksanakan dengan sasaran 38 Kelompok masyarakat (Pokmas) di 5 Desa pada 4 Kecamatan yaitu Desa Mulyosari dan Kradinan Kecamatan Pagerwojo, Desa Kalidawe Kecamatan Pucanglaban, Desa Ngungghahan Kecamatan Bandung, Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel.

Tahun 2016 pelaksanaan Program Jalin Matra di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan dengan 3 (tiga) program, yakni PK2 (penanggulangan kerentanan kemiskinan) dan PFK (penanggulangan feminisasi kemiskinan) dan BRTSM (bantuan rumah tangga sangat miskin) yang tersebar di 12 desa di 6 kecamatan.

Tahun 2017 Program Jalin Matra di Tulungagung dilaksanakan melalui kegiatan penanggulangan kerentanan kemiskinan (PK2) untuk 8 Desa di 4 Kecamatan, dan PFK (penanggulangan feminisasi kemiskinan) tersebar pada 53 desa di 15 kecamatan.



Pembangunan/Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK)

Pembangunan BLK dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana pelatihan tenaga kerja yang memadai sehingga kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan dan angka pengangguran diturunkan. Pembangunan BLK dilaksanakan pada tahun 2014.

Pada tahun 2015 dikembangkan dengan penambahan asrama bagi peserta didik dan Pengadaan Alat/sarana prasarana berupa alat komputer, alat masak memasak (tata boga) dan jahit menjahit.

Pada tahun 2016 dialokasikan untuk melengkapi fasilitas BLK, antara lain: peralatan pertukangan, salon, SPA, dan mesin las.

Dan tahun 2017 dilaksanakan pengadaan sarana prasarana BLK berupa neon boks, running teks, meubelair, audio sound system, seperangkat komputer dan peralatan cetak.



Pengoperasian Angkutan Sekolah Gratis

Bus Sekolah yang dioperasikan pada tahun 2014 sebanyak 6 unit dan pada tahun 2015 dilaksanakan penambahan 1 unit sehingga sampai dengan tahun 2016 berjumlah 7 (tujuh) unit yang menjangkau jalur Ngunut - Tulungagung, Ngantru - Tulungagung, Gondang - Tulungagung dan Kalidawir - Tulungagung.

Disamping itu pada tahun 2016 dilaksanakan penambahan kerjasama dengan MPU dari sebelumnya di tahun 2015 sebanyak 12 unit, hingga pada tahun 2017 meningkat menjadi 27 unit untuk akses siswa di wilayah selatan (Campurdarat, Besuki, Pakel, Bandung) dan siswa di wilayah Sendang dan Karangrejo.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan akses siswa di daerah pinggiran akan pendidikan menengah di wilayah perkotaan, disamping sebagai upaya mengurangi kecelakaan lalu lintas pada anak didik.



Rehab Rumah Tidak Layak Huni

Dalam rangka meningkatkan kelayakan tempat tinggal dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kurang mampu, serta menuntaskan program rehab Rumah Tidak Layak Huni, maka program Rehab Rumah terus ditingkatkan, pada tahun 2013 sebanyak 115 unit. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.192 unit yang terdiri dari dana APBD sebanyak 169 unit dan dana APBN sebanyak 1.023 unit.

Pada tahun 2015 sebanyak 1.713 Unit rumah terdiri dari APBN 1.476 unit dan APBD Kabupaten sebanyak 237 unit.

Pada tahun 2016 jumlah alokasi rehab Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 1.527 unit, dari APBN sebanyak 1.348 unit dan dari APBD sebanyak 179 unit.

Di tahun 2017, kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 526 unit dan dari APBN sebanyak 362 unit.



Pelestarian Seni Budaya Daerah



Dalam rangka menjaga identitas bangsa, mengenalkan seni budaya daerah secara luas ke masyarakat sekaligus sebagai upaya pelestarian budaya, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah banyak menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan budaya. Antara lain: Parade Reog Kendang dalam rangka penurunan bendera di Istana Merdeka, Gelar Seni Dalang Bocah, Festival Karawitan, Festival Langen Beksan, dan Festival Jaranan.



Pemantapan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (PSAI)

Berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat serta ketidakmampuan dan keterbatasan masyarakat menjadikan permasalahan PMKS semakin kompleks. Dalam rangka penanganan Masalah PMKS sekaligus menciptakan keterpaduan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan Sosial Anak, pada tahun 2015 telah diresmikan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (PSAI) Kabupaten Tulungagung.

Unit Layanan ini, berkantor di Jln Pahlawan No 1 Tulungagung dan memberikan pelayanan layanan bagi anak-anak yang dinilai berada dalam situasi berisiko mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, sekaligus memberikan layanan respon langsung bagi kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran untuk memastikan layanan dijalankan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan profesional.

Sampai akhir tahun 2016, Unit Layanan telah menerima kasus sebanyak 112 kasus, dimana besar diantaranya merupakan kasus kekerasan fisik, dan kejahatan seksual, dan hasil penjangkauan anak berisiko sebanyak 163 kasus berisiko.

Dan untuk tahun 2017 sampai dengan pertengahan November 2017, unit layanan terpadu PSAI telah menerima pengaduan sebanyak 169 kasus.

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Bantuan Guru Swasta

Dalam rangka mempersiapkan generasi mendatang menjadi generasi islami dan beriman/taqwa, Pemerintah Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan Program penyelenggaraan pendidikan madin dan bantuan guru swasta direalisasikan melalui bantuan operasional bagi Madin Ula dan Madin Wustho, bantuan untuk pengasuh Madin Ula dan Madin Wustho, serta bantuan guru swasta. Dimana jumlah lembaga madrasah penerima bantuan sebanyak 445 lembaga. Adapun bantuan untuk ustadz dan guru swasta pada lembaga SD, MI, SDLB, SMP, SMPLB, dengan sasaran sebanyak 1.465 orang.

Pelaksanaan Program ini direalisasikan secara terus menerus mulai tahun 2013 sampai tahun 2017 dan direncanakan berlanjut di tahun 2018.

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis

Dalam rangka meningkatkan akses anak didik terhadap pendidikan formal, mengurangi angka Drop Out, serta meningkatkan angka melanjutkan Sekolah, mulai tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan Program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis bagi Anak SD dan SMP Negeri, dengan sasaran gratis adalah Biaya Personal berupa Seragam, tas, sepatu dan atributnya serta Bantuan Biaya Operasional berupa, LKS, PHBN, Ekstrakurikuler dan Kalender. Adapun untuk tahun 2018 rencana Program ini dikembangkan menjangkau siswa siswi dari SD/Mi SMP/MTs Negeri negeri maupun swasta.

MISI 6

**PENGENTASAN
DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
DENGAN POLA TERPADU**



Kegiatan pemecahan rekor MURI Sajian pecel lele terbanyak



Pengembangan Sekolah Ramah Anak

Sekolah memiliki peran penting dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Karena itu, keberadaan sekolah yang memberikan pelayanan ramah pada anak, harus dilaksanakan secara pro aktif.

Dalam rangka pemenuhan hak anak sekaligus untuk mewujudkan Tulungagung sebagai Kabupaten Layak Anak, pada tahun 2017 telah dikembangkan empat belas sekolah Ramah Anak tingkat SD dan SMP antara lain SDN 1 Bendosari, SDN 1 Boyolangu, SDN 1 Ngunut, SDN 2 Tawang Sari, SDN 1 Sumberdadi, SDN 1 Bandung, SDN 1 Kauman, SMPN 1 Bandung, SMPN 1 Ngantru, SMPN 1 Kauman, SMPN 2 Kedungwaru, SMPN 1 Ngunut, SMPN 1 Sumbergempol, dan SMPN 1 Boyolangu.

Pada 14 sekolah dimaksud telah dikembangkan komponen Pelayanan Ramah Anak yang meliputi: Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah dilatih Konvensi Hak Anak (KHA); sarana prasarana dan lingkungan; pelayanan anak; pengelolaan; partisipasi anak; serta pemberdayaan masyarakat.



Minapolitan

Pengembangan kawasan Minapolitan diharapkan mampu menjadi program unggulan dalam upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

Pada bulan Nopember 2015, Kawasan minapolitan Kabupaten Tulungagung meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas pelaksanaan kegiatan Sajian Pecel Lele Terbanyak sebanyak 5.000 porsi. Pemecahan rekor ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya sumberdaya perikanan yang memadai dari kawasan minapolitan Kecamatan Gondang.

Pengembangan Kawasan Minapolitan di kecamatan Gondang dengan usaha budidaya ikan lele ini telah mampu menghasilkan produksi ikan lele sebesar 16.000 ton per hari dan telah mendapatkan beberapa prestasi berskala nasional, diantaranya juara II Tingkat Nasional dalam Lomba kelembagaan Minapolitan pada Tahun 2015.

Hingga tahun 2017, pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Gondang dengan usaha budidaya ikan lele telah mampu menghasilkan produksi lele sebesar 20 ton per hari dan mampu memenuhi pasar di wilayah sekitar Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya, baik dalam bentuk segar maupun dalam bentuk olahan. Saat ini selain budidaya ikan lele, juga dibudidayakan ikan konsumsi jenis lain seperti Gurami dan Patin.

Komoditas Bunga Krisan di Agropolitan



MISI 2

**PENINGKATAN PELAYANAN
DI BIDANG KESEHATAN
YANG MURAH
DAN BERKUALITAS**

Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan di Tingkat Dasar

Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, maka keberadaan sarana prasarana kesehatan yang memadai merupakan prasarana utama disamping aspek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan lingkungan. Untuk itu secara rutin setiap tahunnya telah dilaksanakan program peningkatan sarana prasarana di tingkat dasar berupa Pembangunan IPAL Peningkatan UGD, Pembangunan/peningkatan sarana prasarana Pustu/Puskesmas, dan pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan.

Pada tahun 2014 dilaksanakan Peningkatan Puskesmas Perawatan menjadi Puskesmas mampu PONEB sebanyak 1 unit, Pembangunan Rumah Dinas Dokter sebanyak 4 unit, Rehabilitasi Puskesmas sebanyak 1 unit dan Rehabilitasi Pustu sebanyak 6 unit.

Pada tahun 2015 dilaksanakan Pembangunan IPAL di 8 Puskesmas, Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas sebanyak 1 unit, Peningkatan Puskesmas Non Perawatan menjadi Puskesmas Perawatan sebanyak 2 unit, Peningkatan Puskesmas Perawatan menjadi Puskesmas mampu PONEB sebanyak 2 unit, Pembangunan Puskesmas Peduli Jiwa, Peningkatan UGD sebanyak 5 unit, pembangunan poli lansia, pembangunan polindes serta peningkatan sarana prasarana penunjang lain (paving dan jembatan)

Dan tahun 2016 dilaksanakan Pembangunan Pustu sebanyak 2 unit, Pembangunan Polindes sebanyak 9 unit, Pembangunan Puskesmas 1 unit, Pengadaan Pusling sebanyak 5 unit, Peningkatan Puskesmas Perawatan menjadi Puskesmas mampu PONEB sebanyak 2 unit dan pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan.

Dalam rangka penguatan pelayanan Dasar khususnya yang terkait Upaya Pelayanan Perorangan tahun 2014 telah dilaksanakan pengadaan ambulan sebanyak 7 unit, dan tahun 2015 dilaksanakan pengadaan ambulan sebanyak 15 unit. Dan, pada tahun 2016 telah dilaksanakan pengadaan ambulan sebanyak 6 unit.

Wujud komitmen Pemerintah di bidang kesehatan dari aspek sarana prasarana kesehatan dasar tahun 2017 direalisasikan melalui peningkatan sarana prasarana puskesmas berupa pembangunan UGD dan ruang rawat inap Puskesmas Kedungwaru, rehabilitasi/pembangunan Pagar Puskesmas Pucanglaban, pembangunan/rehabilitasi Puskesmas Tanggunggunung, peningkatan sarana prasarana Puskesmas Pagerwojo, rehabilitasi Rumah Dinas Pustu Kresikan, dan pembangunan IPAL. Selanjutnya untuk penguatan pelayanan Dasar khususnya yang terkait Upaya promotif pada tahun 2017 telah dilaksanakan pengadaan Puskesmas Keliling sebanyak 4 unit.

Agropolitan

Pengembangan kawasan ekonomi khusus berbasis pertanian/perkebunan yang diimplementasikan dalam wujud kawasan agropolitan di wilayah Kecamatan Sendang, menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Tulungagung. Komoditas bunga krisan menjadi salah satu komoditas favorit di kawasan agropolitan selain berbagai macam komoditas hortikultura lainnya. Pada tahun 2015, produksi bunga krisan sebanyak 200.000 batang yang dibudidayakan pada lahan seluas 2.160 m² dan mampu menghasilkan 5.600 ikat bunga krisan.

Pada tahun 2016, produksi bunga krisan sebanyak 189.000 batang ditambah bunga krisan dalam pot yang seluruhnya dibudidayakan pada lahan seluas 4,184 m², dengan jumlah greenhouse sebanyak 18 buah yang beragam ukurannya.

Di tahun 2017, selain sayuran dan susu sapi segar, komoditas bunga krisan masih menjadi salah satu komoditas favorit di kawasan agropolitan. Produksi bunga krisan mencapai 432.500 batang bunga krisan ditambah bunga krisan dalam pot yang dibudidayakan pada 16 buah greenhouse dengan ukuran yang beragam. Bunga Krisan ini dibudidayakan oleh Kelompok Sekar Wilis, Agro Bumi Lestari dan Argo Mulyo, dimana hasilnya telah dipasarkan di wilayah Tulungagung dan Surabaya. Saat ini disamping untuk mencukupi kebutuhan pasar, bunga krisan juga menjadi salah satu daya tarik wisata bagi masyarakat di wilayah Tulungagung dan sekitarnya.



Pemantapan Layanan Public Safety Center (PSC) Kabupaten Tulungagung

Dalam rangka mewujudkan sistem yang dapat memberikan pelayanan kegawatdaruratan secara terintegrasi, memperkuat upaya penanganan pre hospital dan menurunkan angka kecacatan serta kematian, inovasi yang dikembangkan di Kabupaten Tulungagung adalah Public Safety Center (PSC) yang telah dilaunching sejak tanggal 28 Nopember 2015.

PSC terintegrasi dari sisi kesehatan, penanganan kegawatdaruratan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemadam Kebakaran di Satpol PP serta Command Center yang ada di Kepolisian, dan kesemuanya terhubung pada Call Center di RSUD dr. Iskak.

Dalam mewujudkan PSC dilakukan secara bertahap, melalui peningkatan kapasitas SDM nya maupun peningkatan sarana prasarana yang mendukung dari sisi pelayanan dasar maupun kegawatdaruratan rujukan. Guna memperkuat kegawatdaruratan tingkat dasar jumlah pengadaan Ambulan/Puskesmas Keliling sampai tahun 2017 sudah mencapai 31 unit. Dan hal yang membanggakan, saat ini Public Safety Center (PSC) telah diterapkan dan direplikasikan oleh 125 Daerah di Indonesia.

Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) merupakan program Kementerian Koperasi dan UMKM RI melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP), yang merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Kabupaten Tulungagung dipercaya untuk dapat mengemban misi PLUT regional, sehingga dapat memberikan dorongan pencapaian kinerja pogram PLUT secara nasional. Sebagai Pusat Layanan, PLUT merupakan sebuah lembaga yang bersifat nirlaba yang memberikan layanan kepada koperasi dan para pengusaha mikro, kecil dan menengah.

PLUT mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu atap dan diharapkan akan mampu memberikan solusi bagi pelaku KUMKM secara komprehensif dan efektif. Bentuk-bentuk layanan dalam satu atap meliputi konsultasi, pelatihan, pendampingan dan advokasi, pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM maupun lembaga PLUT-KUMKM itu sendiri serta promosi dan rujukan layanan yang lebih spesifik, baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial.

Selaras dengan visi dan misi yang diemban oleh program PLUT dari Pemerintah Pusat, aplikasi program PLUT di Kabupaten Tulungagung juga ingin meningkatkan kualitas usaha koperasi dan UMKM untuk dapat lebih berdaya saing dan tangguh dengan sumber daya yang dimiliki tanpa meninggalkan ciri khas dan karakteristik serta kearifan lokal yang ada di wilayah.

Salah satu keunggulan keberadaan sarana prasarana PLUT di Kabupaten Tulungagung adalah terintegrasinya secara langsung dengan sarana prasarana pelayanan pasar rakyat, sehingga sinergi ini dimungkinkan dapat menumbuhkan iklim dunia usaha yang lebih efektif, baik disisi fungsi PLUT ataupun fungsi Pasar Rakyat yang saat ini sudah ada dikawasan tersebut sehingga akan menggerakkan roda perekonomian di kawasan tersebut.



Peningkatan Pasar Ngantru



Revitalisasi Pasar Panjerejo



Revitalisasi Pasar Gondang



Pasar Hewan Terpadu



Pengembangan Puskesmas Peduli Jiwa



Tulungagung Bebas Pasung tidak cukup bila hanya dipandang sebagai sebuah program, namun merupakan upaya berkelanjutan yang terus menerus melibatkan semua unsur terkait, terutama untuk menjamin akses ke layanan kesehatan dan layanan rehabilitasi sama seperti orang dengan disabilitas lainnya. Data pasung Kabupaten Tulungagung berdasar Data Base Provinsi Jawa Timur tahun 2012 sebanyak 69 kasus pasung.

Sebagai respon terhadap permasalahan jiwa dimaksud, Tulungagung telah mengembangkan Puskesmas Peduli Jiwa di Puskesmas Bangunjaya, yang terus diperkuat penganggarannya melalui APBD Kabupaten yang digunakan untuk Pembangunan Ruang Rawat Inap untuk ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), serta pengadaan sarana/alat kesehatan pendukung Ruang Rawat Inap.

Disamping itu dalam rangka pemberdayaan masyarakat telah dibentuk Posyandu Jiwa di Desa Sobontoro, yang merupakan Posyandu Jiwa Pertama dan masih satu-satunya di Tulungagung. Selanjutnya berkat kerjasama berbagai pihak baik jajaran perangkat Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa, maka sampai dengan bulan Juni 2017 telah dilakukan rujukan ke Rumah sakit Jiwa Provinsi sebesar 100%, yang selanjutnya dilakukan rehabilitasi di Panti Rehabilitasi, namun demikian masih ditemukan kasus-kasus pasung diluar data base Provinsi.



Revitalisasi Pasar Kauman



Revitalisasi Pasar Dono



Revitalisasi Pasar Ngeplak



Revitalisasi Pasar Ngantru

Revitalisasi Pasar Rakyat

Upaya pengembangan sektor perdagangan yang menjadi salah satu motor penggerak perekonomian di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan melalui program-program pembangunan berorientasi kerakyatan. Diantaranya dengan melakukan revitalisasi pasar rakyat yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada Tahun 2015. Dimana Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melakukan revitalisasi terhadap 15 pasar rakyat dan pasar desa diantaranya Pasar Ngemplak, Pasar Kauman, Pasar Ngantru dan Pasar Rejotangan.

Pusat kegiatan revitalisasi pasar rakyat pada tahun 2016 berada di pasar Kauman, Pasar Dono dan Pasar Ngantru. Pengembangan sarana prasarana pasar tradisional juga dilaksanakan di beberapa pasar di wilayah Kabupaten Tulungagung, antara lain Pasar Bandung, Pasar Besuki, Pasar Campurdarat, Pasar Domasan, Pasar Ngunut, Pasar Pagerwojo, Pasar Pakel, Pasar Rejotangan dan Pasar Sumbergempol.

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melakukan revitalisasi Pasar Gondang di kecamatan Gondang dan Pasar Panjerrejo di Kecamatan Rejotangan.

Pada Tahun 2017 ini juga telah dipersiapkan pembangunan pasar hewan terpadu, yang sesuai hasil Studi Kelayakan (Feasibility Studi) akan dibangun Pasar Hewan Ternak Besar dan Kecil, Pasar Unggas, Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia, Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas umum seperti MCK, Mushola, Sanitasi untuk air bersih dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Upaya peningkatan sarana prasarana dan pemeliharaan pasar juga terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pasar sebagai sarana yang mendukung kelancaran distribusi dan akses masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok. Pada tahun 2017 telah dilakukan upaya peningkatan sarana dan prasarana dan pemeliharaan pasar pada 7 (tujuh) pasar yaitu Pasar Ngantru, Pasar Ngemplak, Pasar Campurdarat, Pasar Bandung, Pasar Dono, Pasar Karangrejo dan Pasar Karangwaru (PDS).

Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan Tingkat Rujukan

Upaya peningkatan sarana prasarana kesehatan rujukan terus ditingkatkan, pada tahun 2014 telah dilaksanakan pengadaan peralatan kesehatan TT Kelas III, peralatan kesehatan PONEK, ICU, pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi, pengadaan alat kedokteran penyakit paru dan pada tahun 2015 dilaksanakan pembangunan gedung Pulmonary Center, Pengadaan peralatan PONEK, ICU, IGD RS, pengadaan ambulans Emergency Medical Service (EMS).



Tahun 2016 telah dilaksanakan pembangunan Ruang Rawat Inap, pengadaan peralatan kesehatan untuk Pulmonary Center, Peralatan Jantung, IGD, ICU, Bedah, peralatan rawat inap, peralatan kesehatan PONEK.

Pada Tahun 2017 telah direalisasikan pengadaan peralatan kedokteran untuk operasional pelayanan antara lain Echocardiograph dan Ventilator untuk pelayanan perawatan intensif, BERA (Brain Evoked Response Audiometri) dan Esofagus Rigid untuk pelayanan Poliklinik THT, Incubator Transport untuk pelayanan gawat darurat, Incubator dan Phototherapy untuk pelayanan perinatologi, Suction untuk pelayanan bedah sentral, serta WSD (Water Seal Drainage) untuk pelayanan rawat inap.

Pengembangan Klinik VCT (Voluntary Counselling and Testing)

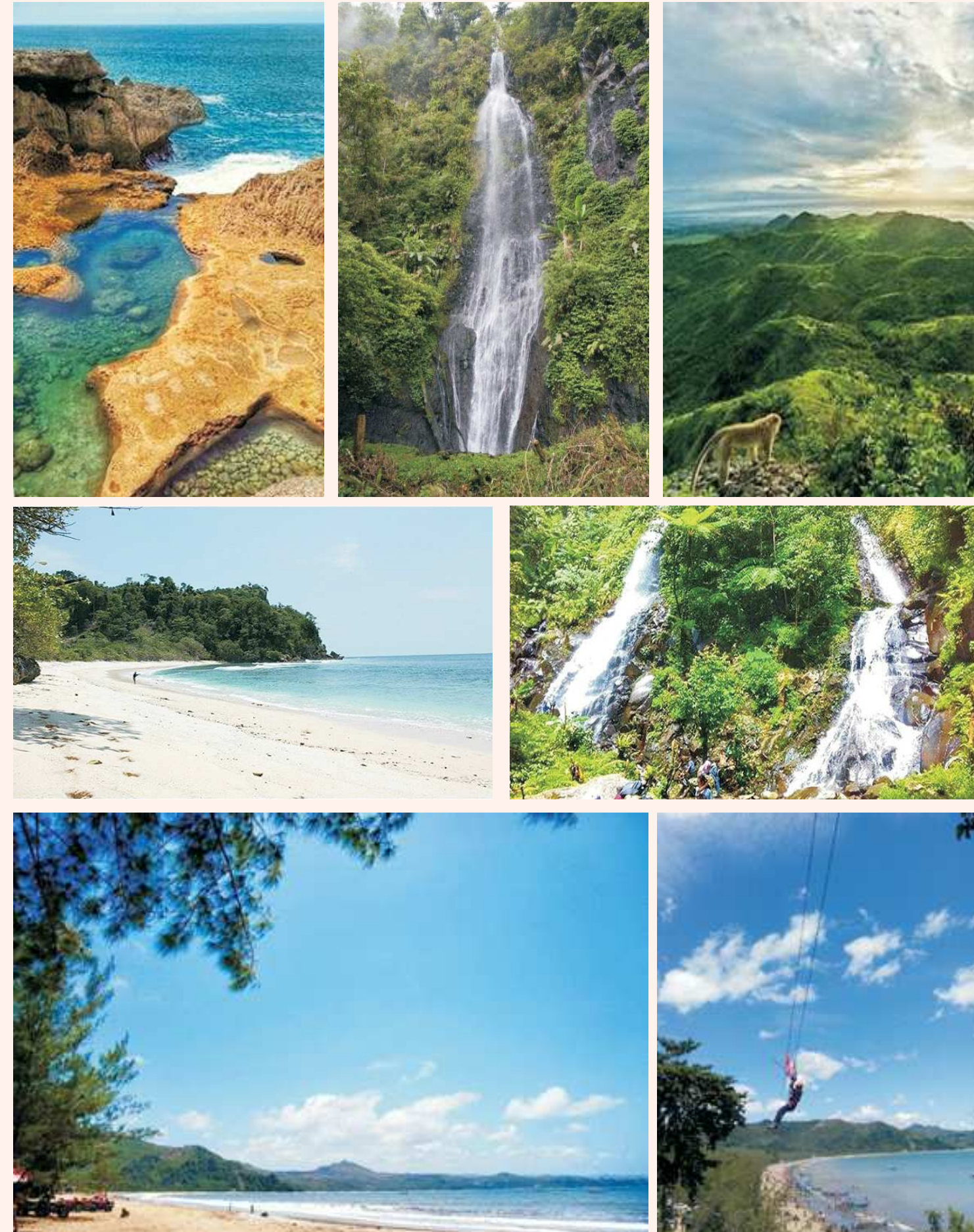


Klinik VCT merupakan pintu masuk untuk pencegahan dan perawatan HIV/AIDS karena pada klinik ini diberikan pelayanan konsultasi dan diberikan pengetahuan tentang HIV serta secara lebih dini dapat diketahui status HIV melalui tes. Pelayanan Klinik VCT pada tahun 2012 selain di Klinik VCT Seruni Rumah Sakit Dr Iskak juga dilaksanakan di 2

Puskesmas yaitu Puskesmas Simo dan Puskesmas Ngunut, dan pada tahun 2014 ditingkatkan menjadi 8 Puskesmas dengan penambahan pada Puskesmas Campurdarat, Puskesmas Bandung, Puskesmas Sumbergempol, Puskesmas Kalidawir, Puskesmas Ngantru dan Puskesmas Pagerwojo. Selanjutnya tahun 2015 ditingkatkan menjadi 12 Puskesmas dengan penambahan pada Puskesmas Kauman, Gondang, Tulungagung dan Sendang.

Tahun 2016, pelayanan Klinik VCT di Kabupaten Tulungagung terus dikembangkan dimana telah ada 2 Rumah Sakit yang memiliki Klinik VCT yaitu RSUD Dr Iskak dan RS Islam ORPEHA, dan 12 Puskesmas yang memiliki Klinik VCT, antara lain Puskesmas Simo, Puskesmas Ngunut, Puskesmas Campurdarat, Puskesmas Bandung, Puskesmas Sumbergempol, Puskesmas Kalidawir, Puskesmas Ngantru, Puskesmas Pagerwojo. Puskesmas Kauman, Gondang, Tulungagung, Sendang.

Tahun 2017, Pelayanan Klinik VCT di Kabupaten Tulungagung telah dikembangkan ke semua Puskesmas (32 unit).



Kerjasama Pengembangan Wisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu memberikan kontribusi utama dalam mendorong pertumbuhan suatu wilayah. Berkembangnya sektor pariwisata akan memberikan efek multiplier terhadap sektor sektor lain sehingga ekonomi masyarakat akan cepat berkembang.

Kabupaten Tulungagung memiliki banyak potensi daya tarik wisata yang masih belum optimal pengembangannya. Sebagian besar dari daya tarik wisata tersebut terletak pada wilayah yang menjadi milik Perhutani.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Perhutani telah membuat kesepakatan melalui penandatanganan MoU Kerjasama Pengembangan Pariwisata di Wilayah Kabupaten Tulungagung. Kesepakatan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama (PKs) pada tiap obyek wisata yang dikembangkan, untuk selanjutnya menjadi dasar dalam pengembangan wisata di Kabupaten Tulungagung.

Beberapa lokasi wisata yang telah disepakati Perjanjian Kerjasama (PKs) dengan Perhutani pada tahun 2016 adalah Pantai Sanggar, Pantai Kedungtumpang, Wisata Gunung Budeg, Air Terjun Lawean dan Air Terjun Jurang Senggani, sedangkan di tahun 2017 telah dilaksanakan PKs untuk wisata Pantai Gemah. Perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan ditindaklanjuti dengan pembangunan sarana prasarana pada lokasi wisata serta pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai pelaku utama dalam pengelolaan kawasan wisata.

Pengembangan Puskesmas Ramah Anak

Puskesmas memiliki peran penting dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesehatan. Karena itu, penyelenggaraan Puskesmas yang memberikan pelayanan ramah pada anak, harus dilaksanakan secara pro aktif.

Dalam rangka pemenuhan hak anak sekaligus untuk mewujudkan Tulungagung sebagai Kabupaten Layak Anak, pada tahun 2017 telah dikembangkan delapan Puskesmas sebagai Puskesmas Ramah Anak yaitu Puskesmas Kauman, Ngunut, Balesono, Boyolangu, Beji, Ngantru, Pucunglor, Bandung

Pada Kedelapan Puskesmas dimaksud telah dikembangkan komponen Pelayanan Ramah Anak yang meliputi: sumber daya manusia (SDM) yang telah dilatih Konvensi hak Anak (KHA); sarana prasarana dan lingkungan; pelayanan kesehatan anak; pengelolaan; partisipasi anak; serta pemberdayaan masyarakat.



Kampung KB

Dalam rangka mensukseskan Program KB sekaligus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mencanangkan Program Kampung KB di Tulungagung. Yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2016 di Dusun Sine Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir. Pemilihan Kampung KB di Dusun Sine tersebut karena memiliki kawasan strategis di wilayah wisata, namun pencapaian KB aktif hanya 58 persen.

Selanjutnya untuk perluasannya sampai tahun 2017 telah dibentuk 20 Kampung KB di 19 Kecamatan.





Peternakan Sapi Perah di Kec. Sendang



Peternakan Itik dan Kambing



Panen Raya Padi varietas impari-16 (bapak Bupati bersama Menteri Pertanian)



MISI 3

**MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN
YANG BERSIH DAN BAIK,
TRANSPARAN, AKUNTABEL,
RESPONSIF DAN DEMOKRATIS**

Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan di Kabupaten Tulungagung khususnya komoditas strategis yaitu padi dan hasil ternak (daging, telur dan susu) selalu mengalami surplus. Pada tahun 2014, produksi padi mencapai 289.083,32 ton, dari areal tanam seluas 47.238 Ha, dari produksi tersebut diperoleh surplus beras sebesar 82.938,55 ton. Sedangkan dari komoditas pangan yang bersumber dari ternak, untuk tahun 2014 produksi daging mencapai 18.577 ton, produksi telur mencapai 45.176 ton dan produksi susu mencapai 49.778 ton.

Hal ini menjadikan Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu daerah penyangga stok pangan di Jawa Timur. Kondisi ini dipertegas pada Tahun 2015 dengan dilaksanakannya panen raya padi varietas Tiwi-1 dan Impari-16 pada bulan April dan Juli 2015 di desa Ngrendeng Kecamatan Gondang. Pada acara panen raya yang dihadiri oleh Menteri Pertanian, bapak Andy Amran Sulaiman, diperoleh hasil panen sebesar 8,6 ton per hektar.

Ketersediaan pangan di Kabupaten Tulungagung khususnya komoditas padi dan jagung sampai akhir bulan Nopember Tahun 2016 adalah Padi sebesar 319.324,32 ton dan jagung sebesar 287.367 ton. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan untuk budidaya padi ada program Luas Tambah Tanam (LTT) hal ini diuntungkan dengan adanya curah hujan yang tinggi akibat fenomena la nina.

Ketersediaan pangan di Kabupaten Tulungagung khususnya komoditas padi dan jagung sampai akhir bulan Nopember Tahun 2017 adalah Padi sebesar 337.316,65 ton dan jagung sebesar 275.277,24 ton. Produksi padi diperkirakan akan terus mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan untuk budidaya padi ada program Luas Tambah Tanam (LTT) hal ini diuntungkan dengan adanya musim hujan yang lebih panjang dan curah hujan yang tinggi.

Keberhasilan pembangunan pertanian ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari semua pemangku kepentingan baik itu masyarakat maupun pemerintah. Dimana dalam hal ini, pemerintah telah banyak memberikan bantuan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi, di antaranya berupa: pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi JITUT/JIDES; pengembangan sumber air, Jalan Usaha Tani, pengembangan optimasi lahan, Hand tractor, pompanisasi, pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan bantuan sarana pasca panen.

MISI 5

**PEMBANGUNAN
EKONOMI KERAKYATAN
BERBASIS UKM, PERTANIAN,
PETERNAKAN, PERIKANAN,
DAN PARIWISATA SERTA PERKEBUNAN
MELALUI KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN**

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Sebagai bentuk respon pemerintah Kabupaten Tulungagung terhadap tuntutan perbaikan pelayanan publik khususnya pelayanan yang bersifat administratif, dan sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan amanat Permendagri No. 4 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dimana tahap awal dilaksanakan di Kecamatan Ngunut.

Payung Hukum yang mendasari berupa Peraturan Bupati Tulungagung No. 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Perijinan dan Non Perijinan dari Bupati Tulungagung Kepada Camat di Kabupaten Tulungagung serta SK Bupati Tulungagung No.188.45/93/013/2015, disamping itu juga telah disusun sebagai payung hukumnya.

Tahun ini PATEN telah diterapkan di 19 Kecamatan di Tulungagung dengan anggaran yang dialokasikan secara rutin setiap tahunnya baik untuk operasional, sosialisasi maupun peningkatan sarana prasarana layanan.



Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Kecamatan dan Kantor Desa

Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, sarana prasarana Kantor Kecamatan dan Kantor Desa terus ditingkatkan. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan peningkatan fisik prasarana kantor kecamatan pada 16 Kecamatan. Dan pada tahun 2015 melalui DAK Bidang Pemerintahan telah dilaksanakan pembangunan Kantor Kecamatan Gondang, Bandung dan Besuki.

Pada tahun 2014 telah dialokasikan dana untuk peningkatan fisik prasarana kantor Desa di 13 desa. Pada tahun 2015 sebanyak 31 desa, tahun 2016 sebanyak 50 desa, dan tahun 2017 dialokasikan sebanyak 33 desa.

Fasilitasi P4GN (Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)



Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sekaligus sebagai respon terhadap meningkatnya penyalahgunaan narkotika di masyarakat, maka pada tahun 2014 telah dibentuk Pokja P4GN di tingkat Kabupaten yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Pembentukan Pokja P4GN di tingkat Kecamatan. Disamping itu upaya gerakan pencegahan penyalahgunaan narkotika dilaksanakan pula di 19 Kecamatan melalui Kegiatan Sosialisasi, kegiatan seminar maupun kegiatan lain yang memberikan muatan P4GN.



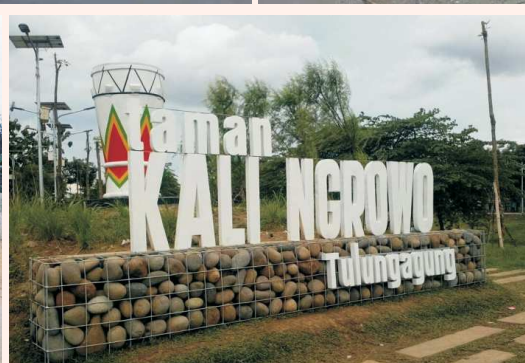
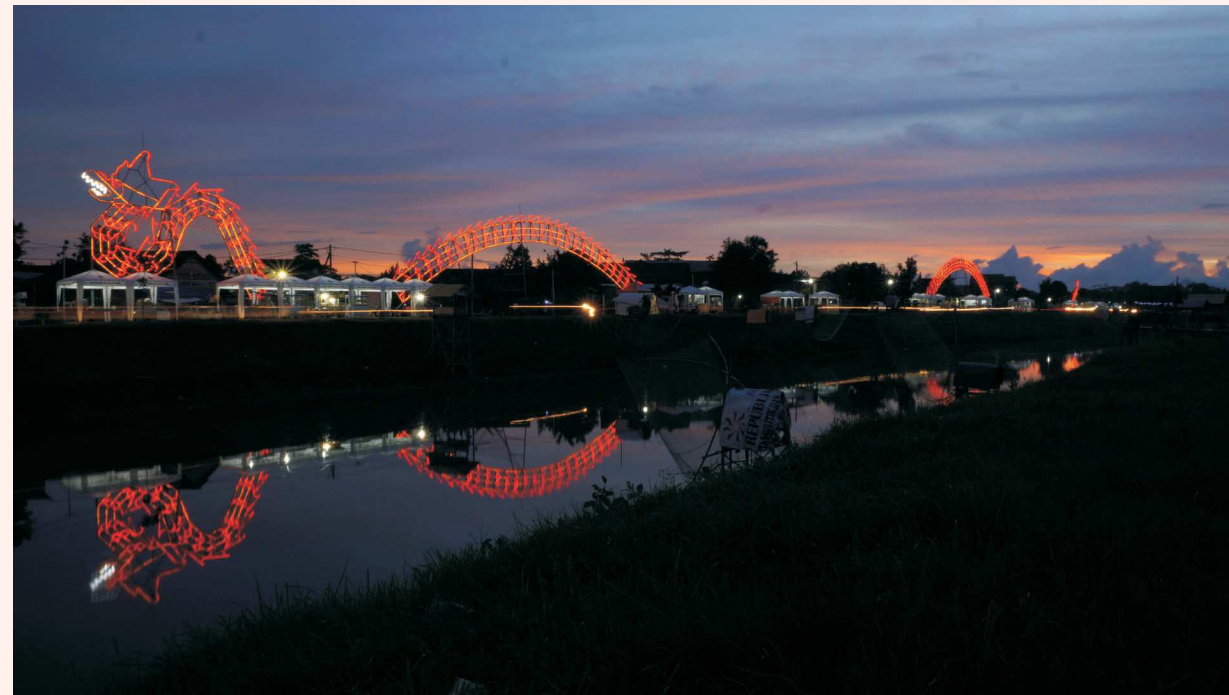
Peningkatan e-Government

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan masyarakat, terutama dalam hal mempercepat proses dan mempermudah akses interaksi masyarakat; Meningkatkan transparansi pemerintahan dengan memperbanyak akses informasi publik, maka penerapan E Government merupakan salah satu prioritas, dengan upaya yang telah dilakukan saat ini antara lain: Implementasi SIPKD dalam Pengelolaan Keuangan, Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Pengelolaan Manajemen Informasi Kepegawaian Berbasis IPTEK, Pelayanan Perijinan Online, Sistem Informasi Jaringan Jalan, Siskeudes, Tulungagung dalam Jaringan, Tulungagung Tourism, Humas Service Center Mail Server, Optimalisasi Sistem Informasi Data (SIMDATA) Kab. Tulungagung, Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal, Aplikasi Sistem Informasi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tulungagung, Pembentukan Sistem Informasi Bidang Hukum, IKM Mart, Sistem Pembayaran Pajak Daerah (SIMPADA), PPDB Online, dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).

Pembangunan Rusunawa

Setelah pada tahun 2016 dilaksanakan pembangunan rusunawa di Desa Tawang Sari, pada tahun 2017 telah dilaksanakan Pembangunan Rusunawa untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berlokasi di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru. Pembangunan Rusunawa tentunya akan mendorong kemudahan penyediaan perumahan yang layak ditengah semakin terbatasnya lahan yang tersedia.





MISI 4

**PENINGKATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR YANG BERBASIS
PEMERATAAN PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN
WILAYAH UNTUK MENDORONG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN
SEKTOR-SEKTOR YANG LAIN**

Jalan Hotmix

Untuk mendukung perkembangan wilayah serta potensi daerah, Kabupaten Tulungagung berkomitmen menerapkan strategi pembangunan infrastruktur (terutama jalan dan jembatan) dengan konsep satu ruas tuntas dan konsep pembangunan jalan poros kabupaten yang mengedepankan pada prioritas pembangunan jalan poros yang menuju pusat kota, ruas jalan antar kecamatan, dan pembangunan jalan yang mengarah pada kawasan strategis seperti kawasan wisata, kawasan agropolitan, dan kawasan strategis lainnya.

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan peningkatan jalan Rejosari, Sine sepanjang 9 KM dan jalan Karangrejo-Ngadi sepanjang 5 KM. Sedangkan di tahun 2015 dilaksanakan peningkatan dan pelebaran jalan yang merupakan jalan poros antar kabupaten di kawasan Selingkar Gunung Wilis serta jalan yang mendukung kawasan agropolitan, diantaranya ruas jalan Pagerwojo-Jodeg sepanjang 8,3 KM dan ruas jalan Tugu-Nyawangan sepanjang 6,2 KM, peningkatan jalan ruas jalan Jepun, Wajak Kidul sepanjang 4,2 KM yang merupakan jalan poros menuju pusat Kota Tulungagung, serta peningkatan jalan ruas jalan Bandung-Sripit sepanjang 7,7 KM yang menghubungkan antar Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.

Dalam upaya mewujudkan jalan yang berkualitas, utamanya jalan-jalan poros antar kecamatan dan antar pusat pertumbuhan, pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tulungagung melaksanakan peningkatan kualitas jalan hotmix.

Adapun lokasi kegiatan tersebut antara lain adalah ruas jalan Kidangan-Purworejo, ruas jalan Gambiran-Penampihan, ruas jalan Gandong-Sanan, ruas jalan Pagerwojo Bendungan, ruas jalan Srikaton-Kaliboto, ruas jalan Jeli-Picisan, ruas jalan Sanggrahan-Junjung, ruas jalan Gondang-Dukuh, ruas jalan Punjul-Picisan, jalan Oerip Soemoharjo, jalan I Gusti Ngurah Rai Gang 8.

Untuk meningkatkan jalan desa menjadi jalan yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berupaya untuk meningkatkan kualitas jalan desa baik yang sebelumnya berupa jalan tanah menjadi jalan lapen, jalan tanah menjadi jalan makadam, jalan makadam menjadi jalan lapen, maupun jalan tanah menjadi jalan beton.

Adapun jalan yang dibangun antara lain ruas jalan Desa Karang Sari, jalan Desa Ngunggahan, jalan Desa Blendis, jalan Desa Segawe-Berak, jalan Desa Tanjung, jalan Desa Tugu, jalan Desa Wonorejo, jalan Desa Wates, jalan Desa Panjerejo, jalan Desa Salak Kembang, jalan Desa Podorejo, jalan Desa Trenceng, jalan Desa Sumberagung, jalan Desa Kalidawir.

Disamping itu juga dilaksanakan rehabilitasi dan pelebaran jalan nasional ruas Kediri Tulungagung yang didanai oleh dana APBN Tahun 2016. Dan di tahun 2017 di Pagerwojo.

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu fungsi ruang yang diprioritaskan keberadaannya dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan khususnya di wilayah perkotaan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan RTH dilaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas RTH di wilayah Kabupaten Tulungagung.

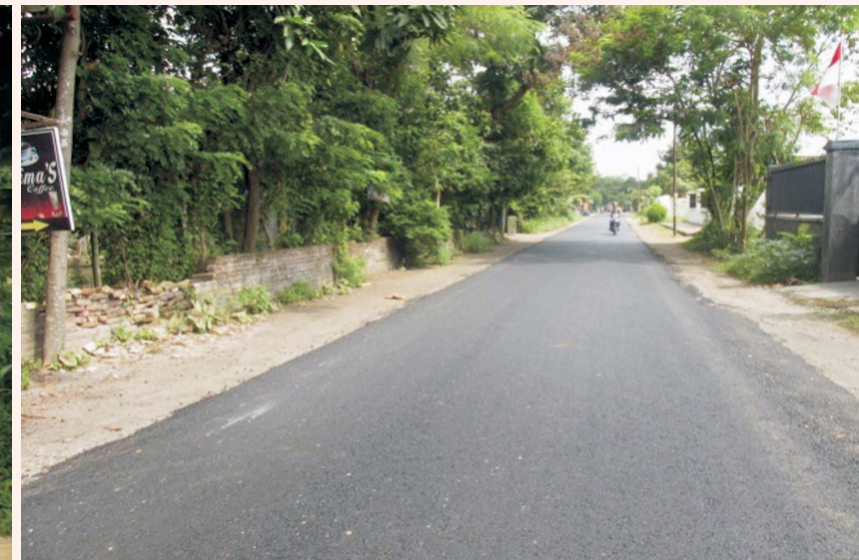
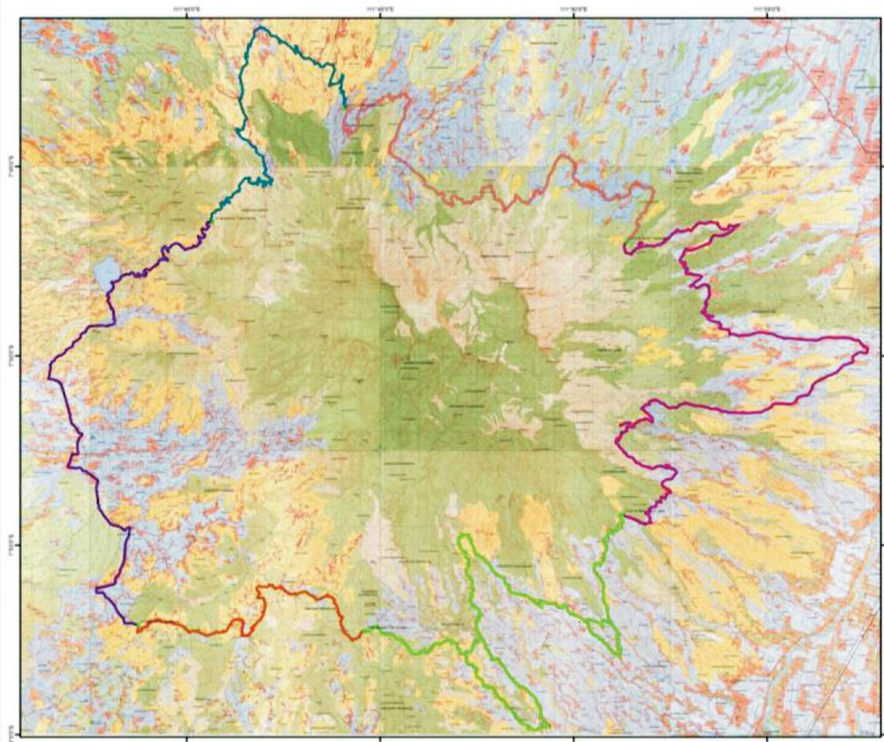
Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pembangunan RTH Ngrowo Water Front dan Ngrowo Jogging Track, diharapkan akan menjadi stimulan yang dapat mengubah budaya masyarakat di sekitar bantaran sungai yang menempati sungai sebagai halaman depan. Pembangunan RTH juga akan dilaksanakan di sepanjang sempadan Kali Ngrowo bertujuan agar di sepanjang Kali Ngrowo lebih tertata keindahan dan kebersihannya.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan pembangunan RTH pada Kawasan Pasar Kliwon dengan nama Taman Ketandan yang dilengkapi dengan playground serta fasilitas pendukung lainnya.

Kegiatan peningkatan kualitas RTH juga dilaksanakan melalui pengembangan Kawasan Hutan Kota.



RENCANA TRASE
LINGKAR WILIS
(±240,13Km)



Pembangunan Ring Road Timur dan Pembangunan Jembatan Ngujang II

Pembangunan Ring Road Timur Tulungagung merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mendorong pertumbuhan kawasan timur Tulungagung. Selain itu juga sebagai alternatif jalan akses baru yang menghubungkan antara jalan Provinsi dengan jalan Nasional di kawasan timur Tulungagung untuk mengantisipasi adanya penumpukan arus kendaraan di jalur jalan Nasional sebelah Barat (kawasan Ngujang).

Ring Road Timur ini menghubungkan Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Ngantru yang dipisahkan oleh Sungai Brantas yang rencananya akan dihubungkan dengan Jembatan Ngujang II. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan pembebasan lahan sepanjang 1100 meter dan lebar 30 meter, dan di tahun 2015 dilaksanakan kegiatan pematangan lahan.

Rencana teknis jembatan sudah disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan hingga saat ini kegiatan Pembangunan Jembatan Ngujang II telah masuk menjadi kegiatan yang akan didanai oleh APBN tahun 2018.

Pembangunan Jalan Selingkar Wilis

Pembangunan jalan Lingkar Wilis melibatkan enam Kabupaten yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri. Panjang trase pada Kabupaten Tulungagung yaitu dari desa Sidomulyo yang berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek sampai dengan desa Nyawangan yang berbatasan dengan Kabupaten Kediri sepanjang kurang lebih 57,673 km.

Pada kawasan selingkar Wilis di Kabupaten Tulungagung terdapat berbagai potensi yang dapat dikembangkan antara lain potensi wisata, pertanian, peternakan dan potensi agropolitan lainnya.

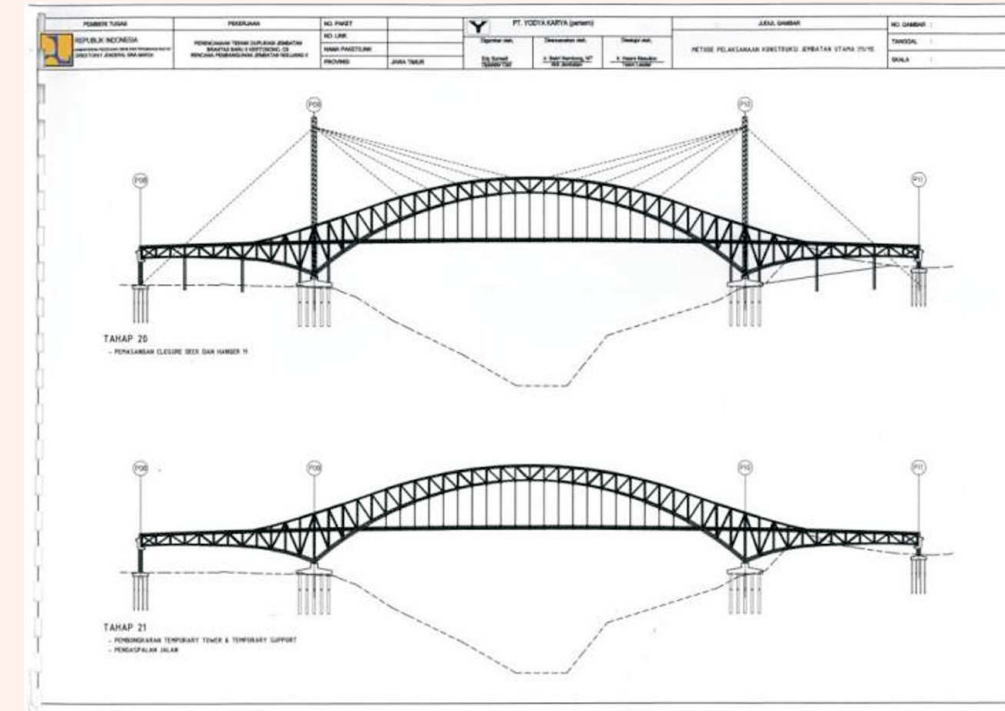
Dalam upaya pengembangan kawasan tersebut saat ini telah dilaksanakan kegiatan berupa pelebaran dan peningkatan jalan ruas jalan Pagerwojo-Judeg dan ruas Tugu-Nyawangan. Untuk ruas Tugu-Nyawangan diadakan kegiatan konstruksi pelebaran dan pembangunan jalan makadam yang berada di desa Nyawangan kecamatan Sendang tembus wilayah Kabupaten Kediri yang merupakan hasil kegiatan TMMD ke 95 tahun 2015.

Kawasan Selingkar Wilis diharapkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru di Jawa Timur.

Jembatan

Dalam upaya pemenuhan infrastruktur jembatan, dilaksanakan pembangunan jembatan yaitu jembatan Desa Blendis, jembatan Desa Pojok, jembatan Desa Sukorejo Wetan, dan jembatan Desa Tanggulturus. Pada tahun 2017, telah dilaksanakan pembangunan Jembatan Rangka di Desa Suwaru dan Mergayu Kecamatan Bandung, Jembatan Gantung di Desa Tanggulwelahan Kecamatan Besuki, dan Jembatan Nglampir.

Dengan terbangunnya jembatan diharapkan aksesibilitas masyarakat akan semakin meningkat sehingga mendorong berkembangnya perekonomian wilayah sekitarnya.



Pembangunan Sektor Sanitasi dan Air Minum

Di tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan target pelayanan sanitasi, penanganan kumuh dan air minum sebagaimana yang telah diprogramkan pemerintah pusat (program 100 0 100), yaitu 100% akses sanitasi baik, 0% kawasan kumuh dan 100% akses air minum sampai dengan tahun 2019.

Kegiatan pembangunan MCK komunal melalui program DAK untuk 9 lokasi antara lain di Pasar Tamanan Kel. Tamanan Kec. Tulungagung, Kelurahan Bago Kec. Tulungagung, Desa Ngunut Kec. Ngunut, Desa Betak Kec. Kalidawir, Desa Kiping Kec. Gondang, Desa Karangnom Kec. Kauman, Desa Pucangan Kec.

Kauman, Desa Karangrejo Kec. Karangrejo dan Desa Ngantru Kec. Ngantru.

Sedangkan untuk penanganan kawasan kumuh telah diadakan kegiatan peningkatan kualitas permukiman berupa

pembangunan jalan lingkungan. Untuk pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun 2015 telah dialokasikan dana DAK berupa pembangunan/optimalisasi sarana air minum. Dengan adanya kegiatan ini capaian akses air minum khususnya di wilayah perdesaan yang dikelola HIPPAM mencapai $\pm 82\%$.

Di tahun 2016 Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya berupa peningkatan kualitas permukiman Desa Rejotangan, Desa Sumberingin Kulon, Desa Blimbing serta Kelurahan Kepatihan, peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan di kelurahan tamanan, kelurahan tertek, kelurahan kutoanyar, kelurahan panggungrejo, pembangunan drainase lingkungan, optimalisasi sarana air minum Desa Tugu, HIPPAM Sumbersongo, Desa Kresikan, pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah, pembangunan sarana air minum Desa Gondanggunung dan desa Nyawangan, pembangunan toilet umum dan jamban keluarga.



Pembangunan Jamban Tanggunggunung

Pengambilan Sampel Air Minum



Pembangunan Saluran Irigasi

Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Tulungagung selain membutuhkan ketersediaan lahan, benih unggul, serta pupuk, juga harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur irigasi yang baik. Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalokasikan anggaran pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi untuk melayani lahan pertanian seluas 12.500 hektar.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tulungagung melaksanakan pembangunan dam baru sebanyak 6 unit, rehabilitasi dam sebanyak 19 unit, normalisasi saluran irigasi sepanjang 12.600 m, pembangunan/peningkatan saluran pasangan batu kali sepanjang 19.345 m dan jumlah baku sawah yang terlayani seluas 8.400 Ha.

